# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan satu bentuk upaya dalam mendukung Perioritas Pembangunan Nasional, yaitu memepercepat pemulihan ekonomi dan memeperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut (Propenas, 2014), penetapan prioritas tersebut berdasarkan pada masalah dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah. Pembangunan inilah yang menjadi tantangan untuk negara berkembang.

Indonesia termasuk kedalam negara yang berkembang, salah satu yang menjadi acuan keberhasilan suatu negara adalah menciptakan tata kelola yang baik dalam lingkungan pemerintahannya. Sejak terjadinya krisis ekonomi pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami goncangan ekonomi yang hebat dimana pemerintah tak mampu membiayai proyek-proyek pembangunan dikarenakan kurangnya pendapatan. Sehingga melemahkan ketahanan ekonomi nasional. yang mengakibatkan berbagai kesenjangan antar daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab dilaksanakannya Otonomi Daerah supaya pembangunan yang diharapakan setiap daerah memeliki peluang untuk mendapatakan dana yang cukup besar serta kebebasan dalam pengelolaannya. (Muhadam, 2015).

Melalui Otonomi daerah maka pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk melakukan peran secara mandiri untuk menentukan prioritas pembangunan. Berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah bahwa diberikannya kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran demi kesejahteraan rakyat yang menyeluruh. Hal tersebut akan tercapai jika pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan pengelolaan potensi daerah dapat diukur dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Salah satu instrument untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. Hasil Analisa rasio tersebut salah satunya bisa digunakan untuk tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi suatu negara maka diperlukan pembiayaan dengan system pembagian keuangan yang adil, transparan dan efisien. Sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolan keuangan daerah yang dilakukan secara benar dapat mendorong timbulnya pertumbuhan ekonomi secara mandiri pada suatu daerah. (Masihad, 2018).

Upaya inilah yang menjadi fokus pemerintah Daerah saat ini termasuk Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saat ini berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Gorontalo ditandai dengan adanya kelesuan pelaku pasar ekonomi ditambah bencana yang melanda seluruh dunia yaitu covid-19. Hal ini menjadi penyebab pendapatan asli daerah menurun atau berkurang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu elemen dari APBD (Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020).

Seperti yang terjadi pada Kabupaten Gorontalo mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2020 jumlah Pendapatan daerah terus bertambah. Bertambahnya pendapatan daerah kabupaten Gorontalo berbanding terbalik dengan pendapatan asli daerah, dimana pada tahun 2017 total PAD sebesar 190,428,308. Kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 147,992,401. Kemudian pada tahun 2019 perlahan naik menjadi 155,465,564. Dan pada tahun 2020 menjadi 175,765,940. Hal ini menunjukan peningkatan secara perlahan selama 4 tahun terakhir. Untuk lebih jelas di tunjukan pada tabel 1 (Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020).

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017 - 2020

| Jenis Pendapatan Pemerintah | Realisasi Pendapatan Pemerintah (Juta Rupiah) | | | | Persen (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| **PENDAPATAN DAERAH** | | | | | |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | Rp.**190.428.308** | Rp.147.992.401 | Rp.**155.465.564** | Rp.**175.765.940** | **11,70%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pajak Daerah | Rp.22.180.564 | Rp.27.456.459 | Rp.31.295.613 | Rp.40.688.657 | |
| Retribusi Daerah | Rp.5.940.900 | Rp.9.099.112 | Rp.5.306.381 | Rp.6.530.990 | |
| Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah | Rp.2.921.391 | Rp.4.581.761 | Rp.5.453.911 | Rp.5.453.911 | |
| Lain-lain PAD Yang Sah | Rp.159.385.453 | Rp.106.855.069 | Rp.113.409.659 | Rp.123.092.382 | |
| **DANA PERIMBANGAN** | Rp.**866.050.166** | Rp.**1.002.264.189** | Rp.**988.549.823** | Rp.**1.002.855.232** | **66,80%** |
| Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | Rp.12.703.066 | Rp.10.620.146 | Rp.10.791.585 | Rp.10.627.668 | |
| Dana Alokasi Umum | Rp.653.986.983 | Rp.653.986.983 | Rp.675.236.653 | Rp.694.578.005 | |
| Dana Alokasi Khusus | Rp.199.360.117 | Rp.337.657.060 | Rp.302.521.585 | Rp.297.649.559 | |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | Rp.**202.994.401** | Rp.**306.795.807** | Rp.**355.139.218** | Rp.**322.737.335** | **21,50%** |
| Pendapatan Hibah | Rp.6.500.277 | Rp.54.823.200 | Rp.60.506.483 | Rp.56.154.155 | |
| Dana Darurat | - | - | - | - | |
| Dana Bagi Hasil dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya | Rp.37.094.340 | Rp.38.023.438 | Rp.45.195.760 | Rp.43.298.268 | |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi KHUSUS | Rp.157.372.168 | Rp.211.949.169 | Rp.248.935.865 | Rp.223.284.912 | |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Rp.2.025.544 | Rp.2.000.000 | Rp.500.000 | - | |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp.2.072 | - | Rp.1.110.000 | - | |
| **JUMLAH** | Rp.**1.259.472.875** | Rp.**1.457.052.397** | Rp.**1.499.154.605** | Rp.**1.501.358.507** | |

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan tabel 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017 -2019 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. Besaranya Pendapatan asli daerah sebesar 11,70 % dari seluruh total pendapatan kabupaten Gorontalo tahun 2020, Untuk dana perimbangan sebesar 66,80% dari total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020. dan untuk pendapatan lain yang sah sebesar 21,50% dari total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020. Hal ini dikarenakan Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo selama 5 tahun masuk dalam kategori wajar tanpa pengecualian (WTP). Akan tetapi pada tahun 2020 pelaksanaan anggaran tidak normal sehingga terjadi pergeseran hingga refocusing anggaran untuk penanganan Covid. (Pomalingo, 2021 dalam read.id)

Upaya Peningkatan pendapatan asli daerah ini sangat menentukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi PAD disuatu daerah, maka peluang daerah tersebut akan menjadi mandiri lebih besar serta dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Berdasarkan hasil laporan akuntabilas Kinerja badan

keuangan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2018 masih termasuk dalam kategori rendah hal ini hal ini dikarenaan karena dana perimbangan dari pemerinah pusat semakin besar sehingga rasio fiscal daerah terus merosot. Sehingga optimalisasi sumber-sumber Pendapatan asli daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. PAD merupakan salah satu modal pemerintah daerah untuk memenuhi belanja dan menperoleh dana pembangunan untuk setiap daerah. Sehingga daerah diharuskan memiliki kemampuan untuk membangun dan majukan daerahnya sendiri dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ

Artinya:" Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Makna dari ayat diatas bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik kecuali dengan usaha dan jerih payahnya sendiri, oleh karena itu kita harus selalu berusaha mendapatkan kehidupan yang semakin baik dalam membangun kemandirian. Rasulullah SAW selalu menegaskan kepada sahabat- sahabatnya bahwa tangan yang diatas (memberi) lebih baik tangan dibawah (meminta atau mengemis) (HR. Bukhari Muslim). Rasulullah SAW sangat mengajurkan umatnya untuk mandiri secara ekonomi. Dampak kemandirian ini sangat luas. Orang yang hidup mandiri dapat berjalan setengah "terbang" saking ringannya. serta Kemandirian merupakan salah satu sifat para nabi. Oleh karena itu guna menuju daerah yang maju dan berkembang maka perlu pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien agar tercipta kemandirian keuangan pada daerah tersebut.

Bedasarkan Uarian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo"**

### 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan asli daerah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan.

2. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi
3. Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Gorontalo tahun 2018 masih termasuk dalam kategori rendah
4. Dana perimbangan dari pemerintah pusat semakin besar sehingga rasio fiskal daerah terus merosot

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya yaitu, untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontal0

### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Dapat dijadikan referensi bagi universitas untuk membantu pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan salah satu rujukan oleh pemerintah daerah dalam peninggatakan peengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan daerah yang mandiri.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk mendukung pemerintah setempat dalam pengelolaan keuangan daerah guna peningkatan kemandirian daerah.

1.5.3. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bagian dari penerapan keilmuan yang di geluti oleh peneliti.